

DAFTAR PUSTAKA

1. Misnaniarti, Hidayat B, Pujiyanto, Nadjib M, Thabrany H, Junaidi P, et al. Ketersediaan Fasilitas dan Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Cakupan Semesta Jaminan Kesehatan Nasional. *J Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan*,. 2017;1:7–15.
2. BPJS Kesehatan. Info BPJS : Pemanfaatan Data JKN Untuk Perbaikan Sistem Kesehatan Indonesia. 72nd ed. Jakarta: Media Internal BPJS Kesehatan; 7 p.
3. Kementrian Sekretariat Negara RI. JKN: Perjalanan Menuju Jaminan Kesehatan Nasional. Jakarta: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; 2015. 72-83 p.
4. Mundiharno, Thabrany H. Peta Jalan Menuju Jaminan Kesehatan Nasional 2012-2019. Jakarta; 2012. 3 p.
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional. 2013.
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 2009.
7. Pusat Data dan Informasi Kesehatan. Profil Kesehatan Indonesia 2018. Kementrian Kesehatan RI; 2019.
8. Laporan Tahunan Dinas Kesehatan Kota Padang Tahun 2018. 2018.
9. Listyani E, Fanda RB, Trisnantoro L. Pertumbuhan Rumah Sakit di Indonesia. 2019.
10. Dinas Kesehatan Kota Padang. Profil Kesehatan Kota Padang Tahun 2014. 2015.
11. Dinas Kesehatan Kota Padang. Profil Kesehatan Kota Padang Tahun 2018. 2019.
12. Health Policy Plus, TNP2K. Pasar Sektor Kesehatan Swasta di ERA JKN. 2018.
13. Pusat Data dan Informasi Kesehatan. Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2014. 2014.
14. Dinas Kesehatan Kota Padang. Profil Kesehatan Kota Padang Tahun 2017. 2018.
15. Listyani E, Fanda RB, Trisnantoro L. Ketersediaan Rumah Sakit di Indonesia Berdasarkan Kelas Tahun 2019. 2019.
16. BPJS Kesehatan. 1 Juli 2019 Semua Rumah Sakit Harus Sudah Terakreditasi. Jakarta: Media Internal BPJS Kesehatan; 2019.
17. BPJS Kesehatan. Ringkasan Eksekutif Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan Jaminan Sosial Kesehatan. Jakarta; 2016.
18. BPJS Kesehatan. Ringkasan Eksekutif Laporan Pengelolaan Program dan

- Laporan Keuangan Jaminan Sosial Kesehatan. Jakarta; 2017.
19. BBC News Indonesia. BPJS Putus Kerjasama dengan Puluhan RS, Satu Juta Pasien Terdampak. Jakarta; 2019 Jan;
 20. Rusady MA. Peranan BPJS Kesehatan Dalam Peningkatan Pelayanan Kesehatan. Jakarta; 2017.
 21. BPJS Kesehatan Kota Padang. Data BPJS Kesehatan Kota Padang Tahun 2014-2018. 2019.
 22. Pusat Data dan Informasi Kesehatan. Profil Kesehatan Indonesia. Kementerian Kesehatan RI; 2015.
 23. Pusat Data dan Informasi Kesehatan. Profil Kesehatan Indonesia. Kementerian Kesehatan RI; 2016.
 24. Pusat Data dan Informasi Kesehatan. Profil Kesehatan Indonesia. 2017.
 25. Haryeni, Yendra N. Kualitas Layanan, Kepuasan dan Loyalitas Pada Pasien Rumah Sakit Swasta di Kota Padang : Berpikir ke Masa Depan. Menara Ilmu. 2019;XIII:87.
 26. Dinas Kesehatan Kota Padang. Profil Kesehatan Kota Padang Tahun 2015. 2016.
 27. Dinas Kesehatan Kota Padang. Profil Kesehatan Kota Padang Tahun 2016. 2017.
 28. Tim Penyusun Bahan Sosialisasi dan Advokasi JKN. Buku Pegangan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional dalam Sistem Jaminan Nasional. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 8-16 p.
 29. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. 2009.
 30. Peraturan Menteri Kesehatan RI No 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional. 2014.
 31. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. 2004.
 32. Putri AE. Seri Buku -4 : Paham JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia; 2014. 92 p.
 33. Tim Peneliti PKMK FKMK UGM. Hasil Temuan Evaluasi Sasaran Peta Jalan Menuju JKN 2014-2018. Topik : Pemerataan Pelayanan Kesehatan. 2019.
 34. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 2011.
 35. Setyawan FEB, Supriyanto S. Manajemen Rumah Sakit. Sidoarjo: Zifatama Jawa; 2019. 23-24 p.
 36. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit. 2014.
 37. OECD. Hospital Beds (Indicator). 2019.
 38. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 34 Tahun 2016

tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia. 2016.

39. Pawson R, Tilley N. *Realist Evaluation*. London: British Cabinet Office; 2004. 2-10 p.
40. Goddard M, Smith P. Equity of access to health care services: Theory and evidence from the UK. *Soc Sci Med*. 2001;1149–62.
41. Braveman P, Gruskin S. Defining equity in health. *J Epidemiol Community Heal*. 2003;254–8.
42. Idris H. *Ekuitas Terhadap Pelayanan Kesehatan : Teori dan Akses dalam Penelitian*. Ilmu Kesehat Masy. 2016;7.
43. World Bank. *Thinking About Equity in Health Financing : A Framework*. Washington D.C.; 2018.
44. Balarajan Y, Selvaraj S, Subramanian SV. Health Care and Equity in India. *NIH Public Access*. 2012;505–15.
45. Kutzin J. Health Financing for Universal Coverage and Health System Performance: Concepts and Implications for Policy. *Bull World Heal Organ*. 2013;602–11.
46. Trisnantoro L, Marthias T, Aktariyani T, Kurniawan MF, Fanda RB, Cintyamena U. *Working Paper Evaluasi 8 Sasaran Peta Jalan JKN dengan Pendekatan Realist Evaluation*. Yogyakarta; 2018.
47. Thomas JW, Penchansky R. Relating Satisfaction With Access to Utilization of Services. *Med Care*. 1984;22:553–68.
48. Khariza HA. *Program Jaminan Kesehatan Nasional : Studi Deskriptif Tentang Faktor-Faktor yang Dapat Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Program JKN di Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya*. 2015;3(4).
49. Nugraheni SW. *Evaluasi Penerapan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) DI RSUD Dr. Moewardi Surakarta*. *J Ilmu Rekam Medis dan Informasi Kesehatan*. 2015;5:1–14.
50. Iva MIN. *Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Di Kota Makassar*. 2015;149–56.
51. Yandrizal, Suryani D, Anita B, Febriawati H. Analisis Ketersediaan Fasilitas Kesehatan dan Pemerataan Pelayanan pada Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Bengkulu, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur. *J Kebijakan Kesehatan Indonesia*. 2014;3:103–12.
52. Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA CV; 2016.
53. Dinas Kesehatan Kota Padang. *Profil Kesehatan Kota Padang Tahun 2019*. Padang; 2019.
54. Listyani E, Fanda RB. *Ketersediaan Rumah Sakit berdasarkan Kepemilikan di Indonesia*. Yogyakarta; 2019.

55. Peraturan Menteri Kesehatan RI No 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit. 2020.
56. Hidayat B. Bukti Empiris Kebijakan Asuransi Kesehatan Sosial : Analisis Data Survei Aspek Kehidupan Rumah Tangga Indonesia (SAKERTI). *Manaj Pelayanan Kesehat.* 2010;13:117–25.
57. Muhammad Fauzi Kurniawan TM, Trisnantoro L. Evaluasi Capaian Pemerataan Layanan Kesehatan yang Berkeadilan di Era JKN di Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta; 2020.
58. Pemerintah Kota Padang. Profil Daerah Kota Padang : Rumah Sakit Kota Padang. 2018.
59. Kementerian Kesehatan RI. Permenkes No 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 2014.
60. Widada T, Pramusinto A, Lazuardi L. Peran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Masyarakat (Studi di RSUD Hasanuddin Damrah Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu). *Ketahanan Nasional.* 2017;23:199–216.
61. Wijayani RW. Dampak Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional Terhadap Kinerja Keuangan Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan. *Kebijakan Kesehatan Indonesia.* 2018;7:134–9.
62. Irwandy. Kajian Literature : Evaluasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia. *Kebijakan Kesehatan Indonesia.* 2016;5:110–4.
63. Irwandy, Sjaaf AC. Dampak Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional terhadap Efisiensi Rumah Sakit : Studi Kasus di Provinsi Sulawesi Selatan. *MKMI.* 2018;14.
64. Permenkes No 99 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan No 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional. Indonesia; 2015

